

BAB V

KESIMPULAN

Setelah melakukan penjabaran mengenai keterlibatan Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq tahun 2015-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan suatu negara akan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. K.J. Holsti memberikan penjelasan bahwa kebijakan luar negeri selalu ditujukan untuk wilayah eksternal negara dan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Holsti menerangkan bahwa tujuan dalam kebijakan luar negeri adalah suatu gambaran keadaan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dengan cara membuat kebijakan luar negeri. Tujuan tersebut kemudian dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : (a) kepentingan dan nilai inti; (b) tujuan jangka menengah dan (c) tujuan jangka panjang universal.

Kebijakan pemerintah Turki untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul di Iraq juga didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kepentingan atau nilai inti dan tujuan jangka menengah. Kepentingan atau nilai inti pemerintah Turki terlibat dalam operasi tersebut adalah untuk mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas bahwa kelompok Kurdi PKK adalah kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Turki. Kelompok ini seringkali melakukan serangan yang menimbulkan banyak korban di Turki. Tujuan awal PKK adalah memisahkan diri dari Turki dan mendirikan negara Kurdi yang independen, namun seiring berjalannya waktu kelompok ini hanya menuntut otonomi khusus bagi Suku Kurdi di Turki. Karena aktivitas pemberontakan yang dilakukan tersebut, PKK merupakan kelompok terlarang bahkan dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pergerakan PKK ternyata tidak hanya terbatas di wilayah Turki saja. PKK melakukan kerjasama dengan organisasi Suku Kurdi lainnya yang ada di Syria, Iraq dan Iran, seperti *Kurdistan Democratic Solution Party* (Iraq), *the Democratic Union Party* atau *Partiya Yekîtiya Demokrat* (Syria) dan *the Party of Free Life for Kurdistan* atau *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* (Iran). Markas utama kelompok ini berada di Pegunungan Qandil, Erbil, yang masuk dalam kekuasaan *Kurdistan Regional Government*, Iraq. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki bekerjasama dengan pemerintah pusat Iraq maupun pemerintahan KRG dalam upaya memerangi PKK.

Pergerakan PKK di Iraq utara mengalami perkembangan ketika kelompok ini bergabung dalam operasi militer untuk membebaskan Sinjar dari pendudukan ISIS. Keterlibatan PKK dalam operasi pembebasan Sinjar memberikan pengaruh cukup signifikan bagi pergerakan kelompok tersebut. PKK yang berafiliasi dengan YPG berhasil mendapatkan simpati dari YBS dan orang-orang Yazidi Sinjar karena telah melakukan penyelamatan terhadap mereka dari kekerasan yang dilakukan ISIS. Keberhasilan PKK memainkan peran penting dalam operasi pembebasan Sinjar tentu menjadi peringatan bagi pemerintah Turki.

Setelah berperan penting dalam membebaskan Kota Sinjar, Kelompok PKK juga menyatakan ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Keterlibatan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul dapat semakin meningkatkan pengaruh kelompok tersebut. Apabila PKK mendapat izin untuk terlibat maka hal tersebut akan menjadikan PKK sebagai entitas politik yang diakui.

Tujuan menengah pemerintah Turki terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul adalah mencegah dominasi kelompok Syiah di Mosul pasca kota tersebut dibebaskan dari pendudukan ISIS. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam tujuan jangka menengah karena merupakan upaya pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Apabila Mosul dikuasai oleh kelompok Syiah pasca dibebaskan dari ISIS,

maka Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul karena pemerintah Iran memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok Syiah Iraq. Di sisi lain, sejak pasca pemerintahan Saddam Hussain, Turki dan Iran merupakan dua negara yang saling berkompetisi untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memastikan Mosul tidak dikuasai oleh kelompok Syiah sebagai upaya memperkuat pengaruhnya dan mengimbangi pengaruh Iran.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwa Iran memiliki pengaruh yang cukup kuat di pemerintahan Iraq terutama karena pasca berakhirnya rezim Saddam Hussain pemerintahan Iraq didominasi oleh Syiah. Iran bahkan membangun aliansi dengan milisi-milisi Syiah yang ada di Iraq dan menyebarkan pengaruhnya melalui aliansinya tersebut. Iran merupakan salah satu partner dagang yang penting bagi Iraq. Meskipun Iran memiliki pengaruh yang cukup kuat di pemerintahan dan dalam bidang ekonomi, tetapi pengaruh Iran belum mampu menyentuh penduduk sipil Iraq.

Pada Operasi Pembebasan Mosul, Iran melalui IRGC menyatakan keterlibatannya yaitu dengan menyediakan penasehat militer dan senjata kepada pemerintah Iraq serta PMF. PMF sendiri merupakan kelompok paramiliter yang didominasi oleh milisi-milisi Syiah. Salah satu milisi Syiah yang memiliki kedekatan dengan Iran, yaitu *the Badr Organization* juga bergabung dalam PMF untuk memerangi ISIS di Mosul. Keterlibatan Iran dan milisi-milisi Syiah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Turki. Apabila pasca dibebaskan dari pendudukan ISIS kemudian Mosul didominasi oleh Syiah maka akan membuka kemungkinan semakin luasnya pengaruh Iran di Iraq. Selain itu, Mosul merupakan kota di Iraq yang mayoritas penduduknya adalah Sunni, sehingga apabila Mosul didominasi oleh Syiah maka dikhawatirkan akan terjadi konflik sektarian di Iraq.